

BAB I

PENDAHULUAN

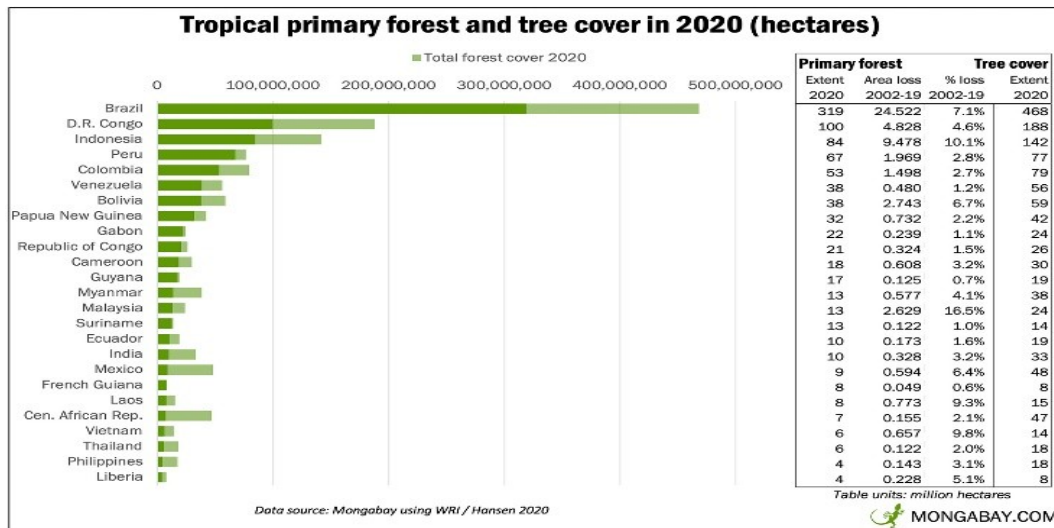
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri rawan bencana (disaster prone are) berdasarkan IRBI indeks Risiko bencana Indonesia setiap tahunnya tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang berisiko rendah terhadap bencana. Indonesia memiliki 127 Gunung api aktif serta dilalui oleh 3 lempeng tektonik yaitu Lempeng Indo Australia Eurasia dan Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan terhadap ancaman bencana letusan gunung api maupun gempa bumi. Adanya curah hujan tinggi serta faktor lingkungan menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Indonesia juga memiliki banyak point of entry baik jalur udara laut dan darat yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit/bahaya dari luar negeri yang berdampak kedaruratan kesehatan masyarakat dan berpotensi menjadi bencana non alam. (Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Nasional,2023).

Bencana berskala besar dapat menghasilkan dampak besar pada individu, keluarga dan masyarakat sehingga menimbulkan ancaman pada kualitas kehidupan (ICN & WHO, 2009). Bencana memberikan dampak pengaruh pada manusia dan lingkungannya seperti kematian,massal,kecacatan,kemiskinan, kelaparan dan rusaknya infrastruktur (Mizan, 2012).

Bencana dapat terjadi ketika interaksi antara *hazard* dengan manusia, lingkungan dan kerusakan harta benda, baik kerusakan dalam skala kecil maupun besar maka disebut sebagai bencana (Pusponegoro & Sujudi, 2016). Bencana terjadi ketika sumber daya lokal tidak mampu mengatasi munculnya suatu peristiwa atau ancaman, apakah disebabkan oleh manusia atau alam, kondisi ini kemudian berimplikasi pada kehidupan manusia (Hodge, Miller, & Dilts Skaggs, 2017).

Sejak tahun 2015-2017 hampir setiap musim kemarau yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah 634 kali (BNPB, 2017).



Gambar 1.1: Tabel Sebaran Hutan Tripis dunia

Indonesia berdasarkan tabel diatas merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki hutan terluas sesudah Berazil dan D.R Kongo. Indonesia memiliki hutan dengan luas wilayah kurang lebih 120.5 juta hektar (63%) dari luas daratan. sebanyak 27 juta hektar dari hutan tersebut merupakan lahan gambut yang tersebar berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan dan Irian Jaya. Lahan gambut tersebut berisiko mengalami kebakaran yang dapat menimbulkan bencana kabut asap (Awaluddin, 2020).

Kabut asap merupakan dampak dari terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Cahyono et al 2015). Kebakaran lahan yang menyebabkan bencana asap dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kondisi iklim dan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan. Faktor iklim yang berupa suhu, kelembaban, angin dan curah hujan juga menentukan kerawanan kebakaran. Penyinaran matahari langsung menyebabkan suhu tinggi sehingga bahan bakar mengering dan mudah terbakar, kelembaban yang tinggi (pada hutan dengan vegetasi lebat) dapat mengurangi peluang terjadinya kebakaran hutan, angin juga turut mempengaruhi proses pengeringan bahan bakar serta kecepatan menjalarnya api sedangkan curah hujan mempengaruhi besar kecilnya kadar air yang terkandung dalam bahan bakar. Sedangkan aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yaitu bara bekas api yang tidak dipadamkan dan adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkontrol (Rasyid, 2014)

Dampak langsung yang dirasakan dari kebakaran lahan dan hutan berupa pencemaran udara yang berasal dari asap yang mengakibatkan gangguan pernapasan dan terganggunya aktifitas sehari-hari (Rasyid, 2014). Kondisi udara yang buruk yang terjadi selama berminggu-minggu akibat dari kabut asap dapat menurunkan fungsi paru. Sedangkan aktifitas lain yang sering terganggu akibat dari kabut asap adalah aktifitas penerbangan di

bandara. Banyaknya penerbang yang dibatalkan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan terjadinya kabut asap berdampak cukup signifikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat, selain berdampak pada kondisi perkonomian, banyak juga masyarakat yang mengalami penurunan kondisi kesehatan yang merupakan dampak dari menghirup udara yang tercemar kabut asap, yang seringkali berujung pada terjangkitnya penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA)

Menurut data BNPB ditemukan 503.884 penderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) tersebar berbagai Provinsi seperti Sumatra selatan, Riau, Jambi, Kalimantan selatan, tengah dan barat, serta menimbulkan korban jiwa sebanyak 26 orang. Selain penderita infeksi saluran pernapasan akut, dampak kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar mencapai 200 triliun rupiah dan 43 juta penduduk terpapar kabut asap (BNPB, 2017; Puspongoro & Sujudi, 2016).

kerugian yang ditimbulkan akibat kabut asap dapat dikurangi dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna atau disebut dengan kesiapsiagaan. upaya kesiapsiagaan terhadap bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga perlu melakukan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi kerugian akibat bencana.

Dalam beberapa kasus bencana, sebagian anggota masyarakat, karena kondisi psikologis dan kepanikannya, tidak berinisiatif melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan dan membantu korban. Sebagian lagi tidak membantu karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana, bersama-sama dengan pihak yang berwenang, menjadi “subjek” atau pelaku. Salah satu bentuk partisipasi pada lingkup yang paling kecil adalah kesiapsiagaan diri dan keluarga masing-masing, sedangkan pada lingkungan yang lebih luas mencakup komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat (Hidayati, 2008).

Kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama para stake holder, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha. Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengurangi jumlah kerugian. Kesadaran akan kesiapsiagaan, masyarakat maupun stake holder akan memiliki persiapan untuk menghadapi kemungkinan adanya bencana.

Bentuk kesiapsiagaan bencana dapat berupa persediaan logistik, alat komunikasi, penyimpanan barang-barang berharga pada tempat yang aman, dan lain-lain. Segala bentuk kesiapsiagaan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana baik kerugian materil, korban jiwa, penyakit dan lainnya

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah serangkaian perencanaan dan kesiapan masyarakat yang dilaksanakan dalam mencegah dan menurunkan efek bencana dengan mengelola dan membuat strategi yang efektif untuk disiapkan dalam keadaan darurat penanggulangan bencana (ICN & WHO, 2009). Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dampak bencana dengan manajemen bencana, khususnya dalam fase kesiapsiagaan (Kulig, Edge, & Smolenski, 2014).

Kesiapan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi kabut asap yang diharapkan adalah bersifat proaktif untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, tanggap darurat serta rehabilitasi yang bekerjasama dengan pemerintah, LSM untuk memelihara lingkungan yang dapat menyebabkan kabut asap agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu indikator rendahnya kapasitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian tindakan, persiapan, dan kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat dengan tujuan mengantisipasi atau menghadapi setiap ancaman bencana yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup manusia secara terencana. upaya pengorganisasian., efektif, dan efisien (UU Nomor 24 Tahun 2007). Kesiapsiagaan merupakan upaya atau cara pengendalian bencana sebagai upaya mengantisipasi atau mengurangi dampak risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas melalui pengetahuan dan sikap tanggap bencana.

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan untuk membangun kesadaran bencana berbasis masyarakat sangat penting, karena dengan keterlibatan masyarakat dalam menganalisis risiko, bahaya, dan kerentanan di sekitarnya, dapat meningkatkan kesadaran yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Program ini juga sejalan dengan strategi prioritas dalam Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, peningkatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pemerintah, swasta, dan keterlibatan perguruan tinggi dalam harmonisasi pentahelix (BNPB, 2019).

Pentingnya Kesiapsiagaan dan keterampilan Masyarakat adalah kunci utama keselamatan dalam menghadapi bencana. kabut asap akan menyebabkan resiko dan terbatasnya pemahaman terhadap karakteristik bencana dilingkungan yang dapat membahayakan keselamatan manusia. tingginya ancaman dan jumlah

Masyarakat yang terpapar bencana alam seperti Kebakaran hutan, banjir gempa bumi maupun bencana lainnya menyebabkan perlunya peningkatan kemampuan dan keterampilan Masyarakat secara terus menerus Sehingga Masyarakat dapat mengetahui bagaimana harus merespon dalam menghadapi bencana.

Kesiapsiagaan bencana disusun sebagai Panduan bagi masyarakat untuk 1) mengetahui ancaman daerah resiko disekitarnya, 2) Kiat-kiat mitigasi yang patut diperhatikan dan berpeluang besar membantu penyelamatan dan perlindungan diri, dan serta menyiapkan 3) Rencana Kesiapsiagaan Keluarga. rencana Kesiapsiagaan Masyarakat pada umumnya memuat pengorganisasian internal masyarakat seperti mengenal jenis ancaman melalui aplikasi Ina-Risk Porsonal (Android App) Berdiskusi dan berbagi peran masing-masing antara Bapak, Ibu, dan anak. termasuk anggota keluarga kelompok rentan (Lansia) dan penyandang Disabilitas serta melaksanakan latihan evakuasi mandiri minimal Satu (1) kali dalam setahun sehingga dapat mengukur dan mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya.

Data Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kalbar menunjukkan, Kabupaten Ketapang menjadi daerah terluas ke dua Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sejak Januari hingga Juli 2023. Data tersebut merupakan rekapitulasi dari Januari hingga akhir Juli 2023. Kabupaten Ketapang hanya berada di bawah Kabupaten Kubu Raya yang sejauh ini menjadi Kabupaten terluas Karhutla. Ketapang menjadi daerah terluas ke dua di Kalimantan Barat yang mengalami Karhutla dengan 1.453,90 hektar," Kalau secara keseluruhan 14 kabupaten/ kota se Kalbar, luas lahan terbakar dari Januari hingga Juli 2023 mencapai 5.768,73 Hektar"(BPBD, 2023)

Kecamatan Muara Pawan merupakan kecamatan terkecil ke-tujuh diantara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, yaitu dengan luas sekitar 610,60 km² atau sekitar 1,93 persen dari total luas Kabupaten Ketapang.

Secara geografis Kecamatan Muara Pawan terletak pada posisi 10 16' 48" LS – 10 49' 36" LS dan 109 53' 36" BT – 110 56' 24" BT (termasuk wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara dan Delta Pawan). Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Muara Pawan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan

Matan Hilir Utara. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Delta Pawan. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Nanga Tayap. Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Karimata. Kecamatan Muara Pawan terdiri dari 8 desa yang berstatus definitif. diantara ke delapan desa tersebut, Desa Ulak Medang merupakan desa yang terluas, dengan luas mencapai 161,28 km² atau sekitar 26,41 persen. Sedangkan desa Suka Maju merupakan desa dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya sekitar 27,80 km² atau sekitar 4,55 persen dari total luas Kecamatan Muara Pawan.

Berdasarkan data di desa Tempurukan tahun 2023, sebagian besar lahan di desa Tempurukan yang luasnya sebesar 110,08 Ha, 89 Ha dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Tanah di desa Tempurukan merupakan tanah liat dan sebagian lahan perairan rawa. Berdasarkan data yang diperoleh desa Tempurukan, terdapat 231 tanah basah (gambut) di desa ini. dengan adanya luas lahan gambut yang besar, maka lahan gambut ini berpotensi untuk terjadinya kebakaran dengan sendirinya akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan maupun dibakar secara sengaja oleh penduduk lokal yang dapat menimbulkan kabut asap yang akan merugikan masyarakat sekitar

Desa Tempurukan merupakan wilayah yang memiliki ancaman dan kerentanan terjadinya bencana kebakaran yang dapat menyebabkan kabut asap dikarenakan wilayah Desa Tempurukan lahan Perkebunan sebagian besar lahan gambut jika suatu waktu ada pemantik atau pemicu bencana seperti kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan, Pembukaan lahan Perkebunan dengan cara membakar lahan maka bencana kebakaran akan terjadi. ketika bencana kebakaran tentu ada upaya untuk penyelamatan harta benda dan manusia serta pemadaman api. Pemadaman kebakaran yang memerlukan petugas pemadam kebakaran tentu membutuhkan akses yang mudah dijangkau untuk dilalui mobil kebakaran.

Maka dari itu peran warga desa Tempurukan dalam upaya pencegahan kebakaran sangat diperlukan. bencana kebakaran yang terjadi di desa Tempurukan, dari hasil wawancara dengan kepala desa Tempurukan sudah terjadi kebakaran yang menyebabkan kabut asap.

Tentu kebakaran hutan dan lahan ini diharapkan bisa di cegah sejak dini sebelum meluas dengan harapan masyarakat ikut terlibat secara langsung untuk menjaga lahan dari api dan tidak membersihkan lahan dengan cara membakar dari tahun 2019 sampai Agustus 2023, 900 hektar lahan ludes dilalap api. 600 hektar diantaranya merupakan lahan gambut diantara 5 kecamatan yang mengalami Karhutla terparah salah satunya adalah kecamatan Muara Pawan. sehingga menyebabkan kabut asap. Karena kondisi

kabut asap itu pula, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ketapang meminta pihak sekolah agar menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah dan meliburkan siswanya hingga kondisi udara kembali normal. Instruksi tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada Senin 4 September 2023 yang ditujukan kepada kepala PAUD, SD hingga SMP di Ketapang tentang kegiatan belajar dari rumah Kepala Dinas Pendidikan Ketapang menyampaikan, kalau surat edaran mengenai kegiatan belajar dari rumah itu dimulai pada Senin 4 September 2023 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia serta pentingnya upaya pengurangan risiko bencana merupakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan secara terpadu dan terarah (Pembriati et al, 2015). Kesiapsiagaan menurut Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana dengan pengorganisasian serta dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses penanggulangan bencana 4 pada tahap pra bencana. Indonesia mengadopsi paradigma pengurangan risiko untuk penanggulangan bencana, dimana penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga perlu melakukan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi kerugian akibat bencana. Dalam beberapa kasus bencana, sebagian anggota masyarakat, karena kondisi psikologis dan kepanikannya, tidak berinisiatif melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan dan membantu korban. Sebagian lagi tidak membantu karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana, bersama-sama dengan pihak yang berwenang, menjadi “subjek” atau pelaku. Salah satu bentuk partisipasi pada lingkup yang paling kecil adalah kesiapsiagaan diri dan keluarga masing-masing, sedangkan pada lingkungan yang lebih luas mencakup komunitas atau kelompokkelompok masyarakat (Hidayati, 2008).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan United Nations for Education/International Strategy for Disaster Reduction (UNESCO/ISDR) mengembangkan framework kesiapsiagaan masyarakat pada 2006. Berdasarkan kajian tersebut disepakati 4 faktor kritis yang berkaitan dengan kesiapsiagaan yaitu Pengetahuan

(P) yang berkaitan dengan fenomena alam dan kesiapsiagaan, kebijakan, peraturan dan panduan dan kebijakan (K), sistem peringatan bencana (PB), dan mobilisasi sumber daya (MSD)

Penelitian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana sangat dibutuhkan untuk mengelola bencana pada masa datang. Manajemen bencana merupakan upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara tepat ,akurat cepat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan .Manajemen bencana (Distater Managemen) mengkaji bencana serta segala aspek yang berkaitan dengan bencana terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana pentingnya manajemen bencana untuk : (a) mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau semua kejadian yang tidak diinginkan,(b)menekan kerugian dan korban akibat dampak suatu bencana,(c) meningkatkan kesadaran semua pihak termasuk masyarakat untuk terlibat dalam proses penanganan bencana dan (d) melindungi anggota masyarakat dari bahaya atau dampak bencana.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, semakin tinggi pengetahuan kebencanaan maka akan semakin tinggi pula sikap kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliana, masyarakat pada umur produktif memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kesiapsiagaan bencana, begitu pula dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pengetahuan mengenai kebencanaan (Yuliana, 2016). (Schartung et al 2011) berpendapat bahwa individu akan beradaptasi dan belajar selama terlibat dalam situasi bencana sehingga ancaman bencana akan direspon secara serius dan lebih efektif 5 di masa depan. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa 81,58% responden telah memiliki rencana evakuasi untuk keadaan darurat (Yuliana, 2016). Masyarakat memerlukan sistem peringatan dini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi jika akan terjadi bencana. Sistem peringatan dini yang baik dapat mengurangi kerusakan yang dialami oleh masyarakat (Nurrahmah, 2015). Berdasarkan penelitian Yuliana, hanya 22, 37% responden yang mengetahui tentang system peringatan bencana . Mobilisasi sumberdaya dibutuhkan individu maupun masyarakat dalam upaya pemulihan atau bertahan dalam kondisi bencana atau keadaan darurat. Sebanyak 947,74 responden memiliki saudara atau yang tinggalnya tidak jauh desa yang dapat membantu saat keadaan darurat (Yuliana, 2016).

Selama ini, penanganan bencana berdasarkan pengalaman berbagai kejadian bencana alam dilakukan setelah terjadi bencana. Penanganan bencana terfokus pada upaya untuk

merespon keadaan darurat bencana. Penanganan bencana yang sifatnya responsif ini tidak efektif untuk mengurangi risiko bencana. Perubahan paradigma penanganan bencana dari respon terhadap bencana menjadi kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana menjadi sangat krusial dan penting untuk dilakukan. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kabut asap di desa Tempurukan Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan uraian diatas besarnya kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari bencana kabut asap dikecamatan Muara Pawan mendorong akan kebutuhan dalam tindakan Kesiapsiagaan dalam masyarakat untuk megurangi kerugian akibat dampak tersebut,oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian terkait “ Gambaran Analisis Kesiapsiagaan bencana kabut asap didesa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPBD Kalimantan Barat tahun 2023 Kabupaten Ketapang adalah daerah yang memiliki risiko tertinggi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Desa Tempurukan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Muara Pawan Kab. Ketapang. Tanah di desa Tempurukan merupakan, tanah liat dan sebagian lahan perairan rawa (gambut). Lahan gambut bersifat renggang sangat mudah terbakar dan api masuk jauh ke dasar lahan, yang menyebabkannya sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran. Kebakaran lahan dan hutan kerap kali terjadi dan menyebabkan terjadinya kabut asap, sehingga masyarakat sekitar mengalami gangguan kesehatan berupa ISPA. Seperti telah diketahui sifat bencana yang terjadi secara acak membuat upaya-upaya penanggulangan bencana sebagian besar hanya berfokus pada tindakan responsif setelah terjadi bencana. Hal ini yang mengakibatkan masih kurangnya studi mengenai kesiapsiagaan bencana, seperti yang terjadi di desa Tempurukan dimana belum terdapat studi yang meneliti tentang kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana kabut asap sebelumnya sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat desa Tempurukan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang dalam menghadapi kabut asap. Berdasarkan paparan latar belakang, Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana “Gambaran Analisis Kesiapsiagaan bencana kabut asap di desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum.

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk melihat “Gambaran analisis kesiapsiagaan bencana kabut asap di desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang”.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan di desa Tempurukan kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang
- b. Untuk melihat dan mengetahui gambaran analisis kesiapsiagaan bencana kabut asap di desa Tempurukan kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang terkait dengan pengetahuan masyarakat di desa Tempurukan.
- c. Untuk dapat memberikan gambaran analisis kesiapsiagaan bencana kabut asap di desa Tempurukan kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang terkait dengan panduan dan kebijakan masyarakat di desa Tempurukan.
- d. Untuk mengetahui gambaran analisis kesiapsiagaan bencana kabut asap di desa Tempurukan kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang terkait dengan sistem peringatan bencana masyarakat di desa Tempurukan.
- e. Untuk melihat gambaran analisis kesiapsiagaan bencana kabut asap di desa Tempurukan kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang terkait dengan mobilisasi sumber daya masyarakat di desa Tempurukan.

D.Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah, hasil dari penelitian yang dilakukan dengan harapan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan pada penggulungan krisis kesehatan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu dengan tulisan karya ilmiah hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor lain yaitu perbedaan individu, sikap, *self efficacy*, kebijakan pemerintah menurut persepsi masyarakat, fasilitas infrastruktur, pengalaman bencana sebelumnya, dan kesiapsiagaan

masyarakat yang berhubungan dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kabut asap.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan manfaat untuk pelayanan pra bencana oleh masyarakat, khususnya terkait kebijakan dari instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Ketapang dan Puskesmas serta masyarakat dalam menghadapi bencana kabut asap, sehingga meningkatkan peran serta masyarakat dan melakukan kerja sama lintas sektoral baik dari tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab Ketapang maupun lembaga non pemerintahan yang berperan aktif dalam menghadapi bencana kabut asap.

E . KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1,1 Keaslian Penelitian

No	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil
1	Kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Semarang Tengah dalam menghadapi bencana kebakaran ,2015	Menganalisis tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.	Kesiapsiagaan Kelurahan Kembang Sari dalam menghadapi Kebakaran.Sub Variable dalam penelitian ini yaitu: a. Sikap b. Rencana tanggap darurat c. Sistem peringatan dini. d. Mobilisasi sumber daya	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Kelurahan Kembang Sari diukur menggunakan Parameter sikap rencana tanggap darurat ,sistem peringatan dini dan mobilisasi sumber daya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran dikelurahan Kembang Sari diketahui 88 % memiliki kesiapsiagaan sedang 3 % rendah dan 9 % tinggi secara Keseluruhan kesiapsiagaan kelurahan Kembang Sari masuk katagori sedang dengan nilai 36,75 atau 67,80 %
2	Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran Pada pemukiman padat Penduduk di Kecamatan Bojong Loa Kaler	Tingkat kesiapsiagaan bencana kebakaran <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sikap dan tingkat pengetahuan 	Tingkat kesiapsiagaan bencana Kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kaler secara keseluruhan dikategorikan ‘Kurang’ siap dengan nilai indeks Kesiapsiagaan Sebesar 52 (dari Nilai Maksimal 100) dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran nilai indeks dari setiap

	.2016n			<p>Indikator kesiapsiagaan masyarakat disetiap wilayah kajian yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Pengetahuan dan sikap tentang bencana kebakaran diKecamatan Bojong Loa Kaler berada dalam katagori “ Siap “ dengan nilai indeks 69,45. b. Rencana tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran dikategorikan “Kurang siap “dengan nilai indeks 40,73 c. Sistem peringatan dini dikecamatan Bojong Loa Kaler dikategorikan ‘Belum Siap “Dengan nilai indeks 25 d. Nilai indeks sumber daya diKecamatan Bojongloa Kaler berada dalam katagori “Belum Siap “Dengan Nilai Indeks 38
3	Nuridin, Nuridin; Amandaty, Srikandi Puspa <i>Health Information: Jurnal Penelitian</i> , 2023, vol. 15,	Analysis of Factors Related to the Preparedness of Puskesmas Nurses in Facing Haze Disasters (Analisis Faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan perawat puskesmas dalam	Analisis faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan Perawat Puskesmas dalam menghadapi bencana Kabut asap Variable dalam penelitian ini yaitu: 1) Jenis kelamin 2) Pendidikan	Tingkat kesiapsiagaan Perawat Di 23 Puskesmas wilayah kerja kota Pontianak sebanyak 90 Perawat dengan hasil 1) Berdasarkan hasil Penellitian bahwa mayoritas perawat (46 ,7 %) memiliki kesiapan manjemen bencana yang masuk dalam katagori kurang. 2) Hasil penelitian pada

		menghadapi bencana kabut asap)	<ul style="list-style-type: none"> 3) Kesiapan manajemen bencana 4) Keterampilan. 5) Suasana pelayanan kesehatan 	<p>keterampilan Perawat yang secara statistic berhubungan dengan kesiapsiagaan sesuai dengan penelitian Anam et al (2016) memaparkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara keterrampilan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.</p> <p>3) Data karakteristik penelitian dengan mayoritas Perawat memiliki kesiapsiagaan rendah .suasana pelayanana kesehatan diukur dengan skala kepuasan kerja. Suasana pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan tingkat kepuasan yang baik, tidak dapat memberikan jaminan persepsi.</p>
--	--	--------------------------------	---	--